

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Nomor: AK.03.01/104/D.III.M.EKON.5/06/2026

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Volume Transaksi E-Commerce	Miliar Fraktur Transaksi	2,5	1,2	1,2	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	% (Persentase)	100	50	82,68	165,36
1.3	Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy	% (Persentase)	80	40	84	210
II	Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	% (Persentase)	85%	45	45	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	% (Persentase)	80%	40	40	100
III	Sasaran Program 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang berkualitas					

3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3,74 dari 4 (Sangat Baik)	124,67
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia yang Efektif					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	% (Persentase)	92	45	45	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Volume Transaksi *E-Commerce*;
- Persentase Penyelesaian *Legal Drafting* DEFA;
- Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Volume Transaksi E-Commerce

Latar Belakang

Ekonomi digital menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi digital. Tren ekonomi digital terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dimana salah satu faktor penggerak pertumbuhannya adalah *e-commerce*. Saat ini, sektor *e-commerce* menyumbang sekitar 72% dari total ekonomi digital Indonesia, dan diproyeksikan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya adopsi digital oleh masyarakat.

Pemerintah menempatkan pengembangan ekosistem *e-commerce* sebagai salah satu prioritas dalam transformasi digital nasional. Jumlah volume transaksi *e-commerce* dipilih sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dinilai mampu merepresentasikan tingkat pertumbuhan perdagangan digital dan dampak terhadap perekonomian nasional. Selain itu, indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,5 Miliar Fraktur Transaksi yang didasarkan pada Bank Indonesia. Adapun target dalam tiap triwulan sebesar 1,2 Miliar Fraktur Transaksi.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Jumlah Volume Transaksi *E-Commerce* telah

mencapai target
dengan
terrealisasi

sebesar 1,2 Miliar Fraktur Transaksi atau mencapai 48% dari target Tahun 2026 yang sebesar 2,5 Miliar Fraktur Transaksi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Volume Transaksi E-Commerce	Miliar Fraktur Transaksi	1,2	1,2	100 (Memuaskan)

*) Nilai realisasi merupakan proyeksi berdasarkan realisasi Triwulan IIV Tahun 2025

Jumlah volume transaksi *e-commerce* yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 8% – 9%. Sampai dengan laporan ini disusun, laporan volume transaksi *e-commerce* yang diterbitkan Bank Indonesia masih belum tersedia, sehingga realisasi yang disampaikan masih bersifat proyeksi. Proyeksi disusun berdasarkan data realisasi volume transaksi *e-commerce* tahun 2025 yang bersumber dari Bank Indonesia, dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi digital pada tahun berjalan relatif sama dengan tahun sebelumnya, seiring dengan dampak perlambatan ekonomi yang tengah terjadi. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2026-2030 yang mencakup penguatan regulasi *e-commerce* termasuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemberdayaan platform *e-commerce* untuk UMKM, dan lainnya maupun sumber lain yang sejalan dengan RPJMN.

Sampai dengan Triwulan II 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa koordinasi informal terkait metodologi yang digunakan untuk pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Adapun diskusi dilakukan dengan melibatkan Prof. Babacan, dan instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan sebagainya.

Proyeksi jumlah transaksi *e-commerce* pada Triwulan II tahun 2026 diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya pada periode yang sama (Triwulan II tahun 2025). Hal ini mengingat Pemerintah berupaya memberikan berbagai insentif seperti momentum kampanye belanja nasional dan global seperti Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS, flash sale dan sebagainya, perluasan akses dan penggunaan digital bagi UMKM dan sebagainya. Oleh karena itu, diprediksikan jumlah transaksi *e-commerce* dapat dipertahankan dan bahkan meningkat sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Volume Transaksi E-Commerce			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i>	Terlaksana	Telah dilaksanakannya Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Membuat timeline target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB;
- ❖ Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi *e-commerce*;
- ❖ Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa (checklist) rencana yang telah disusun

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 1.200.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Saat ini, ketersediaan data transaksi *e-commerce* secara triwulanan masih terbatas dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta instansi lainnya yang memiliki mandat berbeda-beda. Hal ini menyebabkan keterlambatan konsolidasi dan ketidakseragaman metodologi pengumpulan data;
2. Belum adanya metodologi perhitungan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti pembentukan forum dialog antar K/L lintas sektor dalam rangka harmonisasi permasalahan yang ada.

1.2. Persentase

Penyelesaian Legal Drafting DEFA

Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat peran Indonesia di tingkat regional, khususnya dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan ekonomi lintas negara, salah satunya melalui penyelesaian perjanjian *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Indonesia memegang peran penting sebagai salah satu penggagas awal dan penggerak utama dalam inisiatif pembentukan DEFA, yang diproyeksikan dapat menambah PDB kawasan ASEAN hingga USD 2 triliun pada tahun 2030, jika diimplementasikan secara komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, diperkirakan juga sebesar 40% pangsa ekonomi digital ASEAN saat ini berasal dari Indonesia.

Mengingat hal tersebut, Persentase Penyelesaian *Legal Drafting DEFA* digunakan untuk menegaskan pentingnya percepatan dan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi digital kawasan, serta perlunya peningkatan kualitas koordinasi kebijakan dan regulasi sebagai fondasi dalam mewujudkan integrasi ekonomi digital ASEAN yang konkret dan berdaya saing.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan berdasarkan pada besaran paragraph yang telah disetujui Indonesia dalam DEFA. Adapun target Triwulan II sebesar 50%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, persentase penyelesaian legal drafting DEFA mencapai realisasi sebesar 82,68% atau mencapai 165,36% dari target Tahun 2026 yang sebesar 50% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA	% (Persentase)	50	82,68	165,36 (Memuaskan)

Penyelesaian legal drafting DEFA yang mencapai target merupakan *cascading non direct* dari IKU Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Sampai dengan laporan ini disusun, laporan Penyelesaian legal drafting DEFA telah dikirimkan oleh *ASEAN Secretariat* sebagaimana tampak dalam bukti dukung pada dokumen *ASEAN DEFA Comparative Matrix*. Penyelesaian DEFA menjadi salah satu prioritas Menko Perekonomian guna mempercepat transformasi digital di Indonesia. Sebagai diketahui, digital ekonomi menjadi salah satu faktor yang mampu menjadi pendongkrak dalam pertumbuhan PDB Nasional.

Sampai dengan Triwulan II 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pertemuan ASEAN DEFA ke-18;

Pertemuan **ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiating Committee (NC) Putaran ke-18** telah diselenggarakan pada **8–10 Maret 2026** di **Manila, Filipina**, dengan fokus pada penyelesaian isu-isu yang masih tertunda menjelang putaran akhir perundingan. Pertemuan berhasil meningkatkan capaian substansi perundingan secara signifikan, dengan total **135 dari 165 paragraf (81,82%)** telah disepakati, meningkat dari **74,84%** pada putaran sebelumnya. Sementara itu, untuk **pasal substansial**, telah disepakati **119 dari 133 paragraf (89,47%)**, meningkat dari **85,38%** pada DEFA NC ke-17. Sejumlah pasal berhasil diselesaikan, antara lain **Cooperation on International Telecommunications Submarine Cable Systems, Paperless Trading, Source Code, Final Provisions**, serta **Provision of Information**. Adapun ketentuan mengenai **Entry Into Force (EIF)** dan **Relation to Other Agreements** masih memerlukan pembahasan lebih lanjut pada tingkat **ASEAN Economic Ministers (AEM)**;

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada beberapa **pending issues** yang masih memerlukan konsensus, khususnya terkait **Customs Duties, Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI), Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment for Digital Trade, Stakeholder Engagement, Institutional Provisions**, serta **Localization of Computing Facilities (LCF)** dan **LCF for Financial Services (LCF for FS)**. Apabila **Kamboja, Filipina, dan Singapura** dapat bergabung dalam konsensus pada isu-isu tersebut, maka tingkat kesepakatan **pasal substansial diproyeksikan meningkat hingga 96%**. Pertemuan juga dilaksanakan secara **back-to-back** dengan **2nd Legal Experts Meeting (LEM)** yang telah menyelesaikan **legal scrubbing** terhadap seluruh teks yang telah disepakati. Selanjutnya, **DEFA NC Putaran ke-19** dijadwalkan pada **8–10 April 2026** sebagai putaran akhir negosiasi, sebelum pembahasan isu-isu strategis pada **3rd Special AEC Meeting on DEFA**, dengan target **penandatanganan ASEAN DEFA** pada akhir tahun 2026.

2. Laporan Hasil Pertemuan ASEAN DEFA ke-19;

Pertemuan **ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiating Committee (NC) Putaran ke-19** diselenggarakan secara **daring** sebagai putaran lanjutan untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang masih tersisa sebelum finalisasi naskah DEFA. Hingga berakhirnya pertemuan, telah disepakati **145 dari 179 paragraf (81,01%)** dari keseluruhan teks perjanjian. Pembahasan difokuskan pada sejumlah **pasal substansial** yang memerlukan arahan tingkat Menteri, yaitu **Customs Duties, Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI)**, dan **Location of Computing Facilities (LCF)**. Pada isu **Customs Duties**, Indonesia bersama beberapa AMS menolak usulan Singapura mengenai perluasan komitmen **permanent moratorium on customs duties on electronic transmissions** karena dinilai dapat mengurangi ruang kebijakan nasional. Sementara itu, pada isu **CBTI** dan **LCF**, Indonesia tetap mempertahankan posisi untuk menjaga **policy space**, khususnya terkait ketahanan operasional, transfer data lintas batas, serta kewajiban

penempatan **data center** dan **disaster recovery center (DRC)** di wilayah Indonesia sesuai ketentuan domestik;

Selain isu yang akan dibahas pada tingkat Menteri, pertemuan juga melanjutkan pembahasan terhadap pasal **ICT Products that Use Cryptography** dan **Non-Discriminatory Treatment of Digital Products** yang masih memerlukan penyempurnaan teknis dan konsultasi domestik. Indonesia mengikuti konsensus pada pembahasan **ICT Products that Use Cryptography** dengan mengacu pada **WTO JSI** untuk tetap menjaga fleksibilitas kebijakan keamanan dan teknologi nasional, serta masih melakukan konsultasi domestik terkait pengaturan **Non-Discriminatory Treatment of Digital Products** guna memastikan ruang kebijakan melalui **non-conforming measures (NCM)** tetap terjaga. Sebagai tindak lanjut, ASEAN mengusulkan penyelenggaraan **Third Special AECC on DEFA** untuk memperoleh arahan politik atas isu-isu yang belum terselesaikan, disertai proses penyampaian masukan terhadap draft akhir dan pelaksanaan pertemuan intersesi guna mempersiapkan finalisasi naskah DEFA.

Realisasi pada Triwulan II tahun 2026 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Triwulan II dapat optimal karena dukungan penuh dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital serta kerja sama kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait. Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi insentif pada triwulan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Atas hal ini, maka target kinerja pada tahun 2026 yang berupa penyelesaian legal draft ASEAN DEFA dapat terselesaikan dengan optimal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Menghadiri rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-18 dan ke-19 dalam rangka penyampaian posisi Indonesia.	Terlaksana	Rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-18 dilaksanakan pada 8-10 Maret 2026 di Manila, Filipina. Rangkaian perundingan ASEAN DEFA ke-19 dilaksanakan pada 8-10 April 2026 di ASEAN Secretariat, Jakarta.

2.	Melaksanakan relay perundingan ASEAN DEFA ke-18 dan ke-19	Terlaksana	- Pelaksanaan Undangan Relay ASEAN DEFA ke-18; - Pelaksanaan Undangan Relay ASEAN DEFA ke-19.
3.	Menghadiri <i>the 27th AECC Meeting</i>	Terlaksana	- Telah melaksanakan rangkaian <i>27th AECC Meeting</i> tanggal 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina.
4.	Pelaporan proses legal drafting ASEAN DEFA pada Deputi dan/atau pimpinan terkait.	Terlaksana	- Penyampaian Nota Dinas Nomor KSE.04.03/54/D.III.M.EKON.5/03/2026 perihal Laporan Hasil Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran ke-18 tanggal 12 Maret 2026; - Penyampaian Nota Dinas Nomor KSE.04.03/58/D.III.M.EKON.5/04/2026 perihal Laporan Hasil Pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) Putaran ke-19 dan ke-20 tanggal 20 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu dalam draft ASEAN DEFA yang belum berhasil disepakati;
- ❖ Menghadiri kegiatan pembahasan draft DEFA yang diselenggarakan oleh K/L atau instansi lainnya;
- ❖ Mengikuti *capacity building ASEAN DEFA* untuk memiliki kesepahaman, kesiapan dan kapabilitas negara ASEAN terkait aspek yang dibahas;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring seperti penyiapan kertas posisi yang melibatkan K/L terkait, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 8.000.000,00-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Tingkat kesiapan negara ASEAN yang beragam terutama bagi negara advance dibidang teknologi seperti Singapura dibandingkan negara lainnya;
- b. Belum adanya kesepakatan antar negara ASEAN terhadap seperti *Cross Border Data Flows, Location of Computing*, dan sebagainya;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti keikutsertaan dalam *capacity building* ASEAN DEFA dan terus melakukan koordinasi lintas sektor serta antar negara yang baik

1.3. **Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy**

Latar Belakang

Transformasi digital telah mendorong perubahan struktur pasar kerja, dimana kebutuhan terhadap talenta digital yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi semakin meningkat. Di sisi lain, munculnya model ***gig economy*** telah membuka peluang kerja yang lebih fleksibel, berbasis keterampilan (*skill-based employment*), serta didukung oleh pemanfaatan platform digital. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki literasi digital, tetapi juga kompetensi teknis yang diakui melalui sertifikasi agar mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi digital.

Sebagai bagian dari implementasi **Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030**, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan talenta digital melalui pelaksanaan ***Pilot Project Gig Economy*** bekerja sama dengan mitra industri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya mahasiswa dan peserta didik vokasi, agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri digital sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.

Oleh karena itu, **Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy** ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) karena mampu menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan talenta digital yang dilaksanakan pemerintah bersama mitra strategis. Indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan berbasis industri dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, tersertifikasi, serta memiliki daya saing untuk berpartisipasi dalam ekosistem *gig economy* dan ekonomi digital nasional. Program ini pada Triwulan II diimplementasikan melalui penyelenggaraan ***Google AI Talent Development Batch 1***, yang menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pengembangan talenta kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Tahun 2026 untuk Indikator Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi Pilot Project Gig Economy sebesar **80%**, dengan target Triwulan II berupa terlaksananya pelaksanaan pelatihan pada lokasi pilot project gig economy sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan persentase peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memperoleh sertifikasi pada program pelatihan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan mitra strategis.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Program Google AI Talent Development Batch 1 sebagai bagian dari implementasi Pilot Project Gig Economy telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil monitoring per 6 Juli 2026, dari **262 peserta** yang mengikuti program, sebanyak **220 peserta** berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memperoleh status *completed* atau **84% tingkat penyelesaian**, sehingga telah melampaui target IKU tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

1.3 Persentase Peserta Pelatihan yang Tersertifikasi di Lokasi <i>Pilot Project Gig Economy</i>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Finalisasi Konsep pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>	Terlaksana	a. Telah dilaksanakannya finalisasi konsep pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i>
2.	Rapat koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	Terlaksana	a. Telah dilaksanakannya survei lokasi pelatihan di <i>Jakarta Creative Hub</i> bersama dengan Google pada 13 Mei 2026; b. Telah dilaksanakannya rapat pembahasan Rencana Program Pelatihan <i>Google Career Certificates (GCC)</i> untuk Murid SMK DKI Jakarta pada 13 Mei 2026; c. Telah dilaksanakannya rapat Pembahasan Rencana Program Pelatihan <i>Google Career Certificates (GCC)</i> untuk Mahasiswa Universitas pada 13 Mei 2026.
3.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	Terlaksana	a. Telah dilaksanakannya Pembukaan Pelatihan <i>Google AI Talent Development Program Batch 1</i> tanggal 26 Mei 2026 (25 Mei – 5 Juli 2026); b. Telah dilaksanakannya Pelatihan <i>Gig Economy</i> -

			<i>Strategic Thinking for Business Owner with Gemini AI</i> (Google X Hepi Belajar) tanggal 5 Juni 2026.
4.	Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi <i>pilot project gig economy</i> .	Terlaksana	- Laporan Nomor: PK.PKE/68/D.III.M.EKON.5/06/2026 8 Juni 2026 perihal Pelatihan Program <i>Gemini AI Jakarta Creative Hub</i>; - Penyampaian Nota Dinas Nomor PK.PKE/102/D.III.M.EKON.5/07/2026 perihal Laporan Kegiatan Pelatihan dan Penetapan Penerima Beasiswa Batch 1 Program Google AI Talent Development.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Gig Economy* mampu meningkatkan kapasitas talenta digital melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis industri yang melibatkan perguruan tinggi, SMK, serta *Jakarta Creative Hub* sebagai lokasi *pilot project*. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan efektivitas model kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan Google Indonesia, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pelaksana sehingga proses rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, monitoring, hingga penetapan penerima beasiswa dapat terlaksana secara efektif. Ke depan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital akan terus memperluas pelaksanaan program *Gig Economy* melalui penyelenggaraan batch berikutnya dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan, tingkat penyelesaian peserta, serta relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan industri digital.

Realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan Google Indonesia, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pelaksana sehingga proses rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, monitoring, hingga penetapan penerima beasiswa dapat terlaksana secara efektif. Ke depan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital akan terus memperluas pelaksanaan program *Gig Economy* melalui penyelenggaraan batch berikutnya dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan, tingkat penyelesaian peserta, serta relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan industri digital.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Memperkuat mekanisme monitoring dan pendampingan peserta secara berkala bersama institusi mitra guna meningkatkan tingkat penyelesaian pelatihan;
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan mitra pelaksana, termasuk Google Indonesia, perguruan tinggi, SMK, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan batch berikutnya agar proses pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pelaporan dapat berjalan lebih efektif;
- ❖ Melakukan evaluasi terhadap capaian setiap institusi mitra sebagai dasar penyempurnaan mekanisme rekrutmen peserta, pendampingan, serta penentuan kuota pada pelaksanaan Program *Gig Economy* berikutnya;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring seperti rapat koordinasi dan pelaksanaan pelatihan secara hybrid, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 8.000.000,00-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Program *Gig Economy* secara umum berjalan dengan baik dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, antara lain:

1. Tingkat komitmen dan konsistensi peserta dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan masih bervariasi di setiap institusi mitra, sehingga tingkat penyelesaian antar peserta belum merata. Berdasarkan hasil monitoring, masih terdapat beberapa institusi yang memiliki tingkat penyelesaian relatif lebih rendah dibandingkan institusi lainnya;
2. Pelaksanaan pelatihan yang melibatkan berbagai perguruan tinggi, SMK, pemerintah daerah, dan mitra industri memerlukan koordinasi yang intensif, khususnya dalam proses pendaftaran peserta, pemantauan progres pembelajaran, serta konsolidasi data penyelesaian pelatihan dan sertifikasi.

2

Sasaran Kegiatan 2: *Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase

Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi Pengendalian Kebijakan

terkait dengan

dan

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (Stranas Ekodig) 2030 sebagai dokumen arah kebijakan dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dalam dokumen tersebut, terdapat 6 pilar utama yakni: 1). Infrastruktur, 2). Sumber Daya Manusia, 3). Iklim Usaha dan Keamanan, 4). Riset, Inovasi dan Pengembangan Usaha, 5). Pendanaan dan Investasi, dan 6). Kebijakan dan Regulasi. Ke-6 pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 61 inisiatif strategis yang mencerminkan komitmen lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi dan progresif.

Sebagai kelanjutan dari penyusunan kebijakan tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Stranas tersebut melalui kegiatan pengawalan, monitoring, dan evaluasi terhadap inisiatif strategis yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fokus pengawalan ini tidak hanya mencakup pelaporan kemajuan implementasi, tetapi juga mencakup koordinasi lintas kementerian/lembaga, identifikasi hambatan, dan perumusan rekomendasi percepatan guna memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam Stranas Ekonomi Digital 2030

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar **85%**, dengan berupa rekomendasi kebijakan yang berhasil dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. Adapun target Triwulan II sebesar **45%**.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi telah mencapai target dengan terealisasi sebesar **45%** atau mencapai **100%** dari target Tahun 2026 yang sebesar **85%** dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	%	45	45	45 (Memuaskan)

Hasil capaian telah mencapai 100% dari target yang tetapkan, sesuai dengan

target yang ada. Hal ini didukung karena Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital bertugas mengawal kebijakan yang telah dikeluarkan pada tahun sebelumnya yakni kebijakan dalam inisiatif strategis dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 203. Dari 6 pilar yang ada, ditargetkan terselesaikannya inisiatif strategis dari 3 pilar yang ada.

Sampai dengan Triwulan II 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa:

1. Koordinasi pembahasan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks Infrastruktur antara lain;
 - a. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah;
 - b. Rapat Pembahasan Rancangan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Perizinan, Anggaran, dan Keamanan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi serta Penuntasan Wilayah Blankspot;
 - c. Rapat Pembahasan Quantum Computing bersama Sekretariat Wakil Presiden dan kementerian/lembaga terkait;
 - d. Rapat Kickoff Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kementerian/lembaga terkait.
2. Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital, dengan hasil;
 - a. Target utama *skillset* pengembangan SDM Pemerintah (didasarkan pada World Economic Survei) berupa 1). AI dan Big Data, 2). Network dan Cybersecurity, dan 3). Data Analytic. Namun, Kemenko Perekonomian juga terbuka dan mendukung pengembangan SDM digital lainnya (online advertisement dll);
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Google AI Essentials dan Google Career Certificates.
3. Koordinasi Peta jalan Pengembangan Kecerdasan Buatan dan sinkronisasi dengan rencana pembentukan Satgas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan AI;

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha,	Terlaksana	a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.04/38/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Pembahasan Kerangka Konseptual dan Cakupan Sektor Aktivitas

	Inovasi, dan Investasi.		Ekonomi Digital dalam Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB. b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.01/48/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah. c. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.04/39/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 16 April 2026 perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Lanjutan Pembahasan Kerangka Konseptual dan Cakupan Sektor Aktivitas Ekonomi Digital. d. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/53/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Pembahasan Rencana Program Pelatihan Google Career Certificates (GCC) untuk Murid SMK DKI Jakarta. e. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/54/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Pembahasan Rencana Program Pelatihan Google Career Certificates (GCC) untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi. f. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.06/61/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Rapat Teknis Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB bersama Prospera Fase II. g. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: B/PK.PKE/57/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 25 Mei 2026
--	-------------------------	--	--

			perihal Pembukaan Pelatihan Google AI. h. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.04/59/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal Workshop Pemanfaatan Agen AI Berbasis Data sebagai Pendorong Transformasi Digital Artificial Intelligence (AI). i. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: B/PK.PKE/58/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal Pembukaan Pelatihan Gemini AI. j. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/65/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal Permohonan Audiensi terkait Persiapan Pelatihan Gig Economy Tahun 2026. k. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.04/62/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Permohonan sebagai Narasumber pada Workshop Pemanfaatan Agen AI Berbasis Data sebagai Pendorong Transformasi Digital Artificial Intelligence (AI). l. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.06/63/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Rapat Pembahasan Teknis Penguatan Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB. m. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PK.PKE/67/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Undangan Infrastruktur Industri Telekomunikasi dan Informatika.
--	--	--	--

			n. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.06/69/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Rapat Koordinasi Statistik Ekonomi Digital dan Neraca Nasional dengan Australian Bureau of Statistics (ABS). o. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: PED.04.02/70/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Permohonan Audiensi dan Diskusi Pengembangan Pelatihan Ekonomi Digital Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran.
2.	Rapat koordinasi dan pertemuan ASEAN Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), akses OECD, AANZFTA, dan/atau forum di tingkat internasional lainnya.	Terlaksana	a. Berdasarkan Surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: B/PED.04.03/34/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 27 April 2026 perihal Penyampaian Usulan Anggota ASEAN Unique Business Identification Number (UBIN-IC). b. Berdasarkan Telaahan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: T/KSE.04.01/37/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 5 Mei 2026 perihal Masukan Draft Workplan APEC Centre of Excellence for Paperless Trade (ACCEPT). c. Berdasarkan Surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: B/KSE.04.01/39/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Tanggapan terhadap First Draft APEC Policy Principles for Government Decision-Making on Digitalisation of Customs Procedures. d. Berdasarkan pelaksanaan The 27th ASEAN Economic Community (AEC) Meeting

			pada 7 Mei 2026 di Cebu, Filipina, dalam rangka pembahasan perkembangan implementasi <i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>, transformasi digital kawasan, dan penguatan kerja sama ekonomi digital ASEAN. e. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: KSE.03.02/48/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan Ketiga <i>Working Group on Trade and Investment (WGTI)</i> Indonesia–Ekuador, yang antara lain membahas potensi kerja sama perdagangan digital (<i>e-commerce</i>) sebagai salah satu sektor prioritas kerja sama ekonomi bilateral Indonesia–Ekuador.
3.	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan investasi.	Terlaksana	a. Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.03.02/48/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan Ketiga <i>Working Group on Trade and Investment (WGTI)</i> Indonesia–Ekuador, yang antara lain memonitor perkembangan kerja sama perdagangan digital (<i>digital trade/e-commerce</i>) serta evaluasi kesiapan posisi Indonesia dalam pembahasan kerja sama ekonomi bilateral. b. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembahasan Kerangka Konseptual dan Cakupan Sektor Aktivitas Ekonomi Digital dalam Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.04/38/D.III.M.EKON.5/

			04/2026 tanggal 1 April 2026. c. Rapat Koordinasi Evaluasi Lanjutan Pembahasan Kerangka Konseptual dan Cakupan Sektor Aktivitas Ekonomi Digital dalam Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.04/39/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 16 April 2026. d. Rapat Teknis Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bersama Prospera Fase II berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.06/61/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 12 Mei 2026. e. Rapat Pembahasan Teknis Penguatan Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.06/63/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 4 Juni 2026. f. Rapat Koordinasi Statistik Ekonomi Digital dan Neraca Nasional bersama <i>Australian Bureau of Statistics (ABS)</i> berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: PED.04.06/69/D.III.M.EKON.5/06/2026 tanggal 22 Juni 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Mengidentifikasi inisiatif strategis yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya;
- ❖ Menghadiri kegiatan terkait pilar-pilar yang ada dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia (Stranas Ekodig) 2030, seperti pembahasan peta jalan pengembangan semikonduktor dan AI;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 3.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perubahan sebagian besar nomenklatur pada K/L yang menjadi pengampu dalam Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030, sehingga perlu dilakukan pemetaan kembali sesuai kondisi saat ini;
2. Perbedaan prioritas antar K/L terkait;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti koordinasi rutin dengan K/L terkait seperti pembentukan forum dialog antar K/L lintas sektor dalam rangka harmonisasi permasalahan yang ada

2.2. Persentase

***Efektivitas
Sinkronisasi,
Koordinasi dan
Pengendalian
Kebijakan terkait
Penyiapan Posisi
Runding RI untuk
DEFA***

Latar Belakang

Sebagai bagian dari komitmen regional di bawah kerangka ASEAN, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan melalui penguatan kerja sama di berbagai aspek, seperti arus data lintas batas, e-commerce, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta fasilitasi perdagangan digital.

Peran strategis Indonesia dalam perundingan DEFA menuntut adanya penyiapan posisi nasional yang terkoordinasi, konsisten, dan selaras dengan kepentingan nasional dan kebijakan domestik yang berlaku. Mengingat bahwa isu-isu yang diangkat dalam DEFA bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, maka diperlukan suatu mekanisme sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa posisi runding Indonesia mewakili kondisi yang ada di Indonesia saat ini.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan berdasarkan pada besaran paragraf yang telah disetujui Indonesia dan negara lainnya dalam ASEAN DEFA. Adapun target Triwulan II sebesar 40%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi

dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk ASEAN DEFA telah mencapai target dengan terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 yang sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding Indonesia untuk DEFA	% (Persentase)	40	40	100 (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari IKU Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan perundingan *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) pada tahun 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan *ASEAN DEFA Negotiating Committee* (DEFA NC) sebagai bagian dari upaya mempercepat penyelesaian perundingan menuju penandatanganan ASEAN DEFA pada akhir tahun 2026. Sejalan dengan mandat tersebut, Indonesia terus berperan aktif dalam mendorong tercapainya konsensus antarnegara anggota ASEAN, sekaligus memastikan substansi perjanjian tetap mengakomodasi kepentingan nasional. Adapun perkembangan hasil perundingan pada Putaran ke-16 dan Putaran ke-17 menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap penyelesaian substansi perjanjian, sebagaimana diuraikan berikut.

Sampai dengan Triwulan II 2026, koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

a. Penyusunan kertas posisi Indonesia dalam draft DEFA ke-18;

Hingga berakhirnya *ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC)* Putaran ke-18, proses perundingan memasuki tahap akhir penyelesaian substansi sekaligus legalisasi naskah perjanjian. Pada putaran ini, pembahasan difokuskan pada penyelesaian isu-isu horizontal yang masih memerlukan keputusan tingkat tinggi, antara lain mengenai mekanisme **Review**, **Entry into Force (EIF)**, **Reservation**, dan **Accession**, serta penyelarasan substansi hasil negosiasi dengan proses **legal scrubbing** melalui **2nd Legal Experts Meeting (LEM)** yang diselenggarakan secara *back-to-back* dengan perundingan DEFA NC ke-18.

Dalam pembahasan mekanisme **Entry into Force (EIF)**, Indonesia bersama negara anggota ASEAN membahas tiga alternatif mekanisme pemberlakuan ASEAN DEFA, yaitu model **ATISA**, **ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA/ECA)**, dan **AANZFTA**. Indonesia berpandangan bahwa mekanisme pemberlakuan perlu mempertimbangkan kesiapan proses domestik masing-

masing negara anggota sehingga pembahasan lebih lanjut akan diputuskan pada tingkat **SEOM/AEM**.

Indonesia juga berhasil memperjuangkan diterimanya usulan untuk **menghapus ketentuan mengenai Reservation** dalam ASEAN DEFA, dengan pertimbangan bahwa mekanisme reservasi pada umumnya diterapkan dalam perjanjian yang berkaitan dengan isu politik dan keamanan sehingga tidak relevan diterapkan dalam kerangka kerja sama ekonomi digital ASEAN. Selain itu, pada pembahasan **Accession**, Indonesia mendukung pengaturan yang memberikan ruang bagi akses Timor-Leste sesuai mekanisme ASEAN serta membuka kemungkinan perluasan keanggotaan bagi negara di luar ASEAN melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut.

Selanjutnya, melalui **2nd Legal Experts Meeting (LEM)**, proses **legal scrubbing** berhasil menyelesaikan penelaahan terhadap seluruh teks ASEAN DEFA yang telah disepakati, termasuk penyelarasan terminologi, konsistensi penggunaan istilah hukum, serta identifikasi beberapa isu teknis yang akan diselesaikan secara intersessional. Capaian tersebut menjadi landasan penting menuju finalisasi naskah ASEAN DEFA sebelum memasuki tahapan pengesahan pada tingkat **Senior Economic Officials Meeting (SEOM)** dan **ASEAN Economic Ministers (AEM)**.

- b. Penyusunan kertas posisi Indonesia dalam draft DEFA ke-19;
Hingga berakhirnya ASEAN DEFA NC Putaran ke-17, perundingan telah berhasil menyepakati sekitar 116 dari total 155 paragraf atau sekitar 75% dari keseluruhan teks perjanjian, meningkat dibandingkan capaian 67% pada putaran sebelumnya. Sementara itu, untuk ketentuan substantif, tingkat penyelesaian telah mencapai sekitar 110 dari total 130 paragraf atau sekitar 85%, berdasarkan laporan Sekretariat ASEAN. Capaian tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan menuju penyelesaian substansi ASEAN DEFA sekaligus menjadi landasan bagi proses finalisasi ketentuan yang masih memerlukan konsensus sebelum memasuki tahapan *legal scrubbing*.
Hingga berakhirnya **ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC)** Putaran ke-19, proses perundingan berhasil menyepakati **145 dari 179 paragraf atau sekitar 81,01%** dari keseluruhan teks perjanjian. Putaran ini difokuskan pada penyelesaian pasal-pasal substantif yang masih memerlukan arahan tingkat Menteri sebelum proses finalisasi dan penandatanganan ASEAN DEFA pada akhir tahun 2026.
Pada pembahasan **Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET)**, Indonesia bersama Thailand menolak usulan Singapura mengenai perluasan komitmen moratorium permanen atas bea masuk terhadap transmisi elektronik yang sebelumnya telah diatur dalam perjanjian internasional lainnya. Indonesia mempertahankan posisi tersebut untuk menjaga **ruang kebijakan (policy space)** dalam menentukan kebijakan nasional terkait pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik sesuai perkembangan kepentingan nasional.
Pada isu **Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI)**, Indonesia mendukung penggunaan ketentuan **Security Exceptions** sebagaimana diatur dalam **AANZFTA** tanpa penambahan klausul baru, sehingga tetap memberikan fleksibilitas bagi masing-masing negara anggota dalam menjaga kepentingan keamanan nasional serta perlindungan terhadap data dan infrastruktur kritis.
Sementara itu, pada pembahasan **Location of Computing Facilities (LCF)**, Indonesia secara konsisten mempertahankan kebutuhan untuk tetap memiliki fleksibilitas dalam mewajibkan penempatan **Data Center** dan **Disaster Recovery Center (DRC)** di wilayah Indonesia bagi sektor tertentu sesuai ketentuan nasional. Indonesia juga terus mengusulkan pencantuman **footnote** sebagai dasar pengakuan terhadap pengaturan domestik yang berlaku,

sekaligus memperoleh dukungan dari beberapa negara anggota ASEAN terhadap usulan penyederhanaan ketentuan **LCF for Financial Services** ke dalam satu pasal umum mengenai **Location of Computing Facilities**. Selain itu, Indonesia mengikuti konsensus dalam pembahasan **Information and Communication Technology Products that Use Cryptography** dengan mengacu pada pendekatan **WTO Joint Statement Initiative (JSI)**, namun tetap mengedepankan fleksibilitas implementasi sesuai perkembangan kebijakan nasional di bidang keamanan siber dan teknologi. Pada isu **Non-Discriminatory Treatment of Digital Products**, Indonesia juga mempertahankan pendekatan yang mengacu pada **AANZFTA** dan **ATIGA**, dengan tetap menjaga ruang kebijakan nasional melalui mekanisme **Non-Conforming Measures (NCM)** serta memastikan konsistensi dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku.

Realisasi pada Triwulan II tahun 2026 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Triwulan II dapat berhasil karena dukungan penuh dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dan kerja sama serta kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait. Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi insentif pada triwulan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Atas hal ini, maka target kinerja pada tahun 2026 yang berupa persentase Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA dapat meraih pencapaian yang optimal dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring substansi ASEAN-DEFA yang perlu dikoordinasikan	Terlaksana	a. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/50/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 16 April 2026 perihal <i>Relay Hasil Perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> Putaran ke-19. b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/52/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal <i>Legal Editing Meeting (LEM) ASEAN Digital Economy Framework Agreement</i>

			(DEFA). c. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/55/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal <i>Relay Hasil Perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> Putaran ke-21. d. Berdasarkan Telaahan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: T/KSE.04.03/40/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan <i>The 27th ASEAN Economic Community (AEC) Meeting</i> terkait <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> kepada Menteri Keuangan. e. Berdasarkan Telaahan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: T/KSE.04.03/41/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan <i>The 27th ASEAN Economic Community (AEC) Meeting</i> terkait <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> kepada Bank Indonesia. f. Berdasarkan Telaahan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: T/KSE.04.03/42/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan <i>The 27th ASEAN Economic Community (AEC) Meeting</i> terkait <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. g. Berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: T/KSE.04.03/43/D.III.M.EKON.5/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Penugasan Tindak Lanjut <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2.	Rapat koordinasi penyiapan posisi runding	Terlaksana	a. Berdasarkan pelaksanaan <i>ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC)</i> Putaran ke-18 pada 8–10 Maret 2026 di Manila, Filipina, dilakukan koordinasi

	RI untuk ASEAN DEFA ke- 18 dan ke-19 dengan K/L terkait		lintas kementerian/lembaga untuk penyusunan dan penyempurnaan posisi Indonesia terhadap isu-isu strategis ASEAN DEFA sebelum memasuki tahap <i>legal scrubbing</i>. b. Berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: KSE.04.03/49/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Persiapan <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)</i> Putaran ke-19. c. Berdasarkan pelaksanaan ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC) Putaran ke-19 pada 8–10 April 2026, dilakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka finalisasi posisi Indonesia terhadap isu <i>Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET)</i>, <i>Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI)</i>, <i>Location of Computing Facilities (LCF)</i>, <i>ICT Products that Use Cryptography</i>, dan <i>Non-Discriminatory Treatment of Digital Products</i>, sebelum pembahasan pada tingkat Menteri. d. Berdasarkan pelaksanaan <i>Third Special ASEAN Economic Community Council (AECC) on DEFA</i> yang diusulkan pada tanggal 22 April 2026, dilakukan koordinasi lanjutan bersama kementerian/lembaga terkait untuk penyelarasan posisi Indonesia terhadap isu-isu strategis ASEAN DEFA yang masih memerlukan arahan tingkat Menteri.
3.	Penyusunan matriks masukan K/L dan kertas posisi untuk ASEAN-DEFA Ke-18 dan Ke-19	Terlaksana	Sebagaimana link yang dikirimkan kepada peserta rapat

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu dalam draft ASEAN DEFA yang belum berhasil disepakati;
- ❖ Menghadiri kegiatan pembahasan draft DEFA yang diselenggarakan oleh K/L

atau instansi lainnya;

- ❖ Mengikuti *capacity building* ASEAN DEFA untuk memiliki kesepahaman, kesiapan dan kapabilitas negara ASEAN terkait aspek yang dibahas;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pelaksanaan penyiapan posisi untuk DEFA-15 yang dilakukan secara virtual/daring. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 3.000.000,00-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan;

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target penyusunan posisi Indonesia pada perundingan **ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)**. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain:

- a. Masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan dan kepentingan antar negara anggota ASEAN dalam menyepakati sejumlah isu strategis ekonomi digital, sehingga proses perundingan memerlukan pembahasan yang lebih intensif untuk mencapai konsensus;
- b. Masih terdapat beberapa isu substantif yang belum memperoleh kesepakatan penuh, antara lain terkait *Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET)*, *Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI)*, *Location of Computing Facilities (LCF)*, *Non-Discriminatory Treatment of Digital Products*, serta mekanisme *Entry into Force (EIF)* yang masih memerlukan arahan pada tingkat Menteri;
- c. Perbedaan pandangan antar Kementerian/Lembaga pengampu isu dalam menentukan posisi nasional terhadap beberapa ketentuan DEFA, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan siber, layanan keuangan digital, dan kebijakan penempatan pusat data, sehingga diperlukan proses harmonisasi yang lebih komprehensif;
- d. Proses legal scrubbing dan penyelarasan substansi antar bab DEFA masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan *ASEAN Secretariat* dan negara anggota untuk memastikan konsistensi hukum serta kesesuaian dengan komitmen dalam perjanjian perdagangan internasional lainnya;

Berdasarkan kendala tersebut serta capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada triwulan selanjutnya antara lain:

- a. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu isu guna menyusun posisi nasional yang selaras dan mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia;
- b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan negara-negara anggota ASEAN, baik melalui pertemuan formal maupun informal, untuk membangun kesamaan pemahaman terhadap isu-isu yang masih belum mencapai konsensus;
- c. Berpartisipasi aktif dalam rangkaian pertemuan ASEAN DEFA, termasuk *Negotiating Committee (NC)*, *Legal Experts Meeting (LEM)*, dan *capacity building*, guna memperkuat kapasitas negosiator serta mempercepat penyelesaian isu-isu yang masih tertunda;
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan substansi perundingan, serta menyiapkan bahan posisi Indonesia secara lebih komprehensif berdasarkan masukan Kementerian/Lembaga, perkembangan

- regulasi nasional, dan dinamika negosiasi di tingkat ASEAN;
- e. Memperkuat koordinasi dengan ASEAN Secretariat dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian proses *legal scrubbing* dan finalisasi naskah ASEAN DEFA sebagai persiapan menuju penandatanganan perjanjian pada akhir tahun 2026.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator yaitu Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan konektivitas. Pencapaian tersebut dapat dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi intensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, baik dari sektor publik maupun swasta.

Sebagai lembaga berfungsi sebagai koordinator pada bidang ekonomi digital, maka diperlukan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang efektif, responsif, dan adaptif guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi digital dapat berjalan secara harmonis, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan komitmen internasional Indonesia.

Untuk menilai efektivitas peran koordinatif tersebut, diperlukan suatu ukuran kinerja yang dapat merefleksikan persepsi dan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Indeks Kepuasan Layanan KSP di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan aspek kepuasan substansi layanan, yang dilakukan secara semesteran pada Triwulan II dan IV. Adapun survei dilakukan dengan menggunakan skala 1-4, dan disebarkan kepada seluruh stakeholder terkait.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital pada tahun 2026 adalah skala 3 dari 4 (baik) dengan berupa rekomendasi kebijakan yang berhasil dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital kepada oleh kementerian/lembaga atau instansi terkait mendapatkan hasil yang memuaskan dalam survei yang dilakukan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja

setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV. Namun, jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada tahun sebelumnya, maka kami memproyeksikan bahwa target dapat terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target Triwulan II yang sebesar 3,74, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (baik)	3,74 dari 4 (sangat baik)	124,67

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 3 dari 4 dapat terealisasi sesuai yang diharapkan. Hal ini dengan berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan periode sebelumnya (Triwulan II 2026). Sehingga secara umum, diproyeksikan bahwa capaian kinerja pada periode berikutnya dapat mencapai >3 dari 4 atau lebih dari 100%.

Adapun pada Triwulan II ini, Keasdepan Pengembangan Ekonomi Digital sudah melakukan berbagai kegiatan seperti:

- c. Identifikasi stakeholder yang akan menjadi tujuan pelaksanaan survei;
- d. Penyiapan daftar pertanyaan dalam survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang pengembangan ekonomi digital;
- e. Penyiapan konsep surat keluar yang akan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga maupun instansi atau stakeholder lainnya

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi,	Terlaksana	Survei layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Asisten Deputi Pengembangan

	Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital.		Ekonomi Digital semester I tahun 2026 telah dilaksanakan pada 25 Juni s.d. 7 Juli 2026 berdasarkan pada Surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital melalui surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor B/AK.02.02/62/D.III.M.EKON.5/06/2026
2.	Pelaporan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	a. Berdasarkan Laporan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: AK.02.02/81/D.III.M.EKON.5/07/2026 tanggal 8 Juli 2026 tentang Laporan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026, yang memuat hasil pelaksanaan survei terhadap 31 responden dari 40 Kementerian/Lembaga/Instansi sebagai dasar pelaporan capaian Indeks Kepuasan Layanan Semester I Tahun 2026 sebesar 3,74 (skala 4)
3.	Evaluasi hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital Semester I	Terlaksana	a. Berdasarkan Laporan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: AK.02.02/81/D.III.M.EKON.5/07/2026 tanggal 8 Juli 2026, dilakukan evaluasi terhadap hasil survei yang menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,74 dari skala 4, dengan nilai tertinggi pada indikator Efektivitas koordinasi terkait perencanaan/penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Digital sebesar 3,90, serta nilai terendah pada indikator Kemampuan dalam menyelesaikan isu di bidang Pengembangan Ekonomi Digital yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga sebesar 3,61 sebagai bahan perbaikan kualitas layanan);

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan responden, dilakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan *minutes of meeting* yang lebih komprehensif, percepatan tindak lanjut hasil rapat koordinasi, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Ekonomi Digital.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Menjaga hubungan dan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait;
- ❖ Berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi;
- ❖ Memiliki *link* daftar hadir beserta nomer telepon peserta yang tersedia secara online dan dapat diakses dimanapun;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, juga menggunakan link survei tanpa berbayar dalam pelaksanaan layanan kepuasan. Atas hal ini, diproyeksikan efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi yang membutuhkan pertemuan secara fisik.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Lambatnya respon dari responden survei kepuasan;
2. Seringkali responden salah mengartikan bahwasanya survei ditujukan pada level tertentu saja;
3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Responden;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti tetap menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan stakeholder tanpa membedakan level jabatan.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas, ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator yaitu Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital pada tahun 2026 sebesar 92%. Target tersebut dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 25%

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 yang sebesar 45% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	%	45	45	100% (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang pada Tahun 2026 yang pada Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 92% (kumulatif per tahun).

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses

pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital pada Triwulan II 2026 sudah sesuai dengan target dan kertas kerja rencana aksi RB General yang telah ditetapkan, dengan berbagai kegiatan seperti:

- a. Telah terselesaikannya penyusunan laporan kinerja triwulanan;
- b. Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026;
- c. Telah terselesaikannya Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan;
- d. Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.

Sampai dengan Triwulan II Indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada Triwulan II ini, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital diproyeksikan dapat tercapai di akhir Triwulan II 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan laporan kinerja triwulanan	Terlaksana	a. Berdasarkan Laporan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor: AK.02.02/81/D.III.M.EKON.5/07/2026 tanggal 8 Juli 2026 tentang Laporan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026, yang menjadi salah satu dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang memuat realisasi indikator kinerja, capaian rencana aksi, analisis pencapaian target, kendala, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital.

2.	Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026	Terlaksana	a. Koordinasi internal dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan Semester I Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian target dan pelaksanaan kegiatan pada Semester II Tahun 2026; b. Penyusunan bahan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai bagian dari penyesuaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 yang mendukung proses Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
3.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulanan	Terlaksana	a. Monitoring pelaksanaan Program <i>Google AI Talent Development Batch 1</i> sebagai bagian dari pencapaian Rincian Output Prioritas Nasional bidang pengembangan talenta digital, melalui pemantauan tingkat partisipasi, penyelesaian pelatihan, dan hasil pelaksanaan program pada Semester I Tahun 2026. b. Monitoring pelaksanaan Program <i>Gig Economy</i> melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan sebagai bagian dari evaluasi capaian program pengembangan SDM ekonomi digital. c. Monitoring perkembangan pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui rapat evaluasi kerangka konseptual, pembahasan metodologi, dan koordinasi bersama Prospera serta Badan Pusat Statistik sebagai bagian dari pemantauan capaian Rincian Output Prioritas Nasional. d. Pelaksanaan Survei Layanan

			Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026 sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kualitas layanan serta peningkatan kinerja unit kerja, berdasarkan Laporan Nomor: AK.02.02/81/D.III.M.EKON.5/07/2026 tanggal 8 Juli 2026
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	a. Rutin melakukan koordinasi dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam rangka optimalisasi penggunaan SRIKANDI sebagai aplikasi umum naskah dinas elektronik; b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk, surat keluar, nota dinas, disposisi, penugasan, serta dokumen administrasi lainnya di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital guna mendukung tertib administrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ❖ Memperdalam pemahaman terkait arah dan kebijakan kedepan untuk ekonomi digital sebelum penentuan target kinerja maupun renja atau renstra;
- ❖ Melakukan diskusi dan sinkronisasi RPJMN dan arah kebijakan pimpinan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Jangka waktu pengumpulan dokumen target (renja, renstra, dan sebagainya) yang dirasa kurang lama;

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti terus melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pejabat lainnya maupun rekan dikantor terkait pentingnya optimalisasi SRIKANDI ataupun penyelerasan target dengan arah kebijakan Pemerintah

Jakarta, 30 Juni 2026

Asisten Deputi

Pengembangan Ekonomi Digital



Theodore Sutarto

NIP. 19811010 2005021001